

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara memiliki dinamika pasar yang kompleks dan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional. Dengan populasi penduduk yang mencapai lebih dari 270 juta jiwa serta posisi geografis yang strategis, Indonesia memiliki beberapa jenis pasar yang menjadi pusat jual beli kebutuhan sehari-hari masyarakat, mulai dari pasar tradisional hingga pasar modern yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. (Communications, marketing, 2024). Pasar-pasar ini tidak hanya menjadi pusat transaksi jual beli barang dan jasa saja, tetapi juga menjadi cerminan kondisi ekonomi masyarakat di daerah tersebut yang mencakup daya beli, tingkat inflasi hingga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Meskipun demikian, dalam proses pembangunan ekonomi nasional, pasar di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan yang tidak selalu berlangsung secara merata dan mengindahkan faktor keadilan. Kondisi ini menimbulkan beragam permasalahan struktural yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak terkait untuk menciptakan sistem pasar yang lebih berkelanjutan dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan kondisi ekonomi politik Indonesia saat ini, terjadi ketimpangan kekuasaan yang besar dan menyeluruh dalam struktur ekonomi nasional. Aspek modal, sumber daya, serta beberapa jalur distribusi banyak dikuasai oleh kelompok ekonomi besar yang memiliki kekuatan finansial dan hubungan politik yang kuat. Ketimpangan ini tidak hanya terwujud dalam kepemilikan aset dan sebagainya, akan tetapi terwujud juga pada kemampuan mereka memengaruhi kebijakan pemerintah, mengatur harga bahan pokok, mengatur harga pasar nasional, dan juga mengendalikan distribusi barang dari produsen hingga konsumen. Akibat dari ketimpangan ini, pelaku usaha kecil dan menengah sulit untuk bersaing secara adil

karena keterbatasan modal, teknologi, infrastruktur serta akses terhadap informasi dan jaringan distribusi. (Harsono, 2025)

Pasar merupakan salah satu lembaga yang cukup penting perannya dalam institusi ekonomi suatu wilayah, sekaligus sebagai penggerak ekonomi suatu wilayah. Pada dasarnya, pasar merupakan wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik itu sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Definisi pasar sendiri yaitu tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli dalam melakukan kegiatan interaksi jual-beli. Kegiatan jual-beli ini tentunya berpengaruh terhadap pengembangan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan dari jenisnya, pasar dibedakan menjadi dua jenis yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun oleh pemerintah dan di kelola langsung baik oleh pemerintah itu sendiri, oleh pihak swasta, koperasi maupun swadaya masyarakat setempat. Pasar tradisional biasanya berupa kios-kios, toko, tenda, dan lain sebagainya, yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil ataupun menengah, dengan ciri adanya proses tawar menawar yang terjadi. Sedangkan pasar modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola secara langsung baik oleh pemerintah, pihak swasta, maupun koperasi kedaerahan yang berbentuk lebih modern seperti *mall*, *supermarket*, *minimarket*, *shopping center* dan lain sebagainya. Pada dasarnya, perbedaan pasar tradisional dengan pasar modern bisa dilihat dari *management* yang berlaku, biasanya pasar tradisional lebih banyak di akses oleh masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi rendah dan menengah karena di pasar tradisional masyarakat dapat membeli barang dengan harga yang lebih murah, berbeda dengan pasar modern yang cenderung banyak di akses oleh masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke atas yang memang memiliki modal usaha yang lebih besar dan harga yang cenderung lebih mahal. (Timoer & Trernggana, 2019)

Pasar tradisional, yang telah menjadi bagian dari ekonomi Indonesia merupakan pusat ekonomi masyarakat. Pasar ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli barang dan jasa, tetapi juga sebagai ruang sosial dan budaya tempat masarakat saling berinteraksi, bernegosiasi, dan menjalin hubungan berdasarkan nilai-nilai kebersamaan. Berbeda dengan pasar modern yang cenderung bersifat formal dan transaksional, pasar tradisional memiliki ciri khas berupa sistem tawar

menawar yang lebih fleksibel, hubungan akrab antara pedagang dan pembeli yang terbentuk melalui kepercayaan dan langganan, serta ketersediaan berbagai produk lokal yang lebih segar seperti hasil pertanian dan perikanan dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini membuat pasar tradisional tetap menjadi pilihan utama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Harga yang lebih murah menyebabkan pasar tradisional menjadi aspek penting dalam menjaga ekonomi lokal di suatu wilayah, karena di dalamnya melibatkan langsung produsen, pedagang dan konsumen secara langsung. Di pasar tradisional, perputaran uang terjadi cukup besar khususnya bagi ekonomi tingkat lokal, sehingga ekonomi tidak hanya di rasakan oleh pelaku ekonomi besar saja, tetapi juga di rasakan oleh pelaku ekonomi kecil seperti petani, nelayan, dan lain sebagainya.

Pasar tradisional saat ini tengah mengalami pertanyaan besar dalam upaya untuk berbenah. Pasar tradisional perlu melakukan modernisasi dan meningkatkan kualitas layanan, namun tetap harus menjaga ciri khas yang menjadi keunggulan utama, seperti kedekatan antara pedagang dan pembeli, sistem tawar-menawar, serta harga yang lebih terjangkau bagi kalangan masyarakat rendah dan menengah. Karena itu, revitalisasi pasar harus dilakukan secara menyeluruh dan memperhatikan kondisi sosial dan budaya setempat. Revitalisasi tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik pasar saja, tetapi juga pada peningkatan kemampuan pedagang, penguatan organisasi pedagang, penerapan sistem pengelolaan yang melibatkan semua pihak, serta pemanfaatan teknologi digital agar pasar tradisional bisa menjangkau lebih banyak konsumen tanpa kehilangan nilai-nilai budaya dan kebersamaan yang menjadi ciri khasnya. (Puteri et al., 2025)

Di dalam internal pasar tradisional sendiri, sering terjadi ketimpangan kekuasaan antara pedagang sebagai pengguna tempat atau penyewa tempat dengan pihak pengelola pasar. Pengelola pasar yang memang memiliki wewenang langsung untuk menentukan sebuah kebijakan seperti tarif retribusi, penentuan lokasi berdagang, dan tentunya aturan operasional pasar tradisional tersebut yang sering dibuat tanpa melibatkan para pedagang. Akibatnya, pedagang berada dalam posisi lemah dan tidak memiliki kekuatan untuk menolak kebijakan yang dibuat oleh pengelola pasar yang sering merugikan para pedagang pasar.

Bentuk ketimpangan dan ketidakadilan ini terlihat dari adanya rencana revitalisasi pasar secara tiba-tiba, kenaikan tarif retribusi yang tidak jelas, pemindahan lokasi berdagang ke pasar sementara selama dilakukan revitalisasi pasar, pungutan liar oleh oknum-oknum, serta kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pasar yang seharusnya dipakai untuk perbaikan fasilitas pasar tradisional. Selain itu, kurangnya wadah atau organisasi pedagang yang kuat membuat posisi mereka semakin lemah, karena tidak memiliki saluran resmi untuk menyampaikan pendapat membela hak-hak para pedagang. Akibatnya, banyak pedagang terpaksa mengikuti kebijakan pengelola demi mempertahankan tempat berjualan mereka yang menjadi sumber utama penghasilan bagi mereka dan keluarganya.

Salah satu contoh nyata dari ketimpangan kekuasaan antara pedagang dengan pengelola pasar dapat dilihat dalam program revitalisasi pasar yang sering menimbulkan penolakan dari banyak pedagang. Penolakan ini bukan karena para pedagang menolak akan perubahan, akan tetapi karena adanya kekhawatiran yang terjadi terhadap dampak ekonomi yang akan mereka alami. Para pedagang khawatir harus menanggung biaya relokasi sementara (pasar sementara), kehilangan penghasilan selama proses renovasi, dan menghadapi kenaikan biaya sewa atau retribusi kios setelah pasar selesai direvitalisasi. Kenaikan ini biasanya terjadi karena pengelola ingin menutup biaya pembangunan yang sangat besar.

Sebagian besar pedagang di pasar tradisional bekerja dengan keuntungan yang sangat kecil dan bergantung pada perputaran modal harian. Mereka khawatir, kenaikan biaya operasional akibat meningkatnya biaya setelah revitalisasi selesai akan semakin menekan keuntungannya mereka, bahkan bisa membuat usaha mereka tidak lagi bisa operasional. Kekhawatiran ini wajar terjadi karena daya beli masyarakat sebagai konsumen utama pasar tradisional juga terbatas dan mudah terpengaruh oleh perubahan harga bahan pokok. Masalah ini semakin kompleks karena pengelola pasar tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai rincian biaya revitalisasi pasar tradisional, pembagian kompensasi bagi pedagang selama masa peralihan ke pasar sementara. Akibatnya pedagang merasa program revitalisasi tersebut dirancang tanpa memperhatikan kemampuan ekonomi mereka

dan lebih menekankan pada penampungan pasar atau target administratif pihak pengelola saja.

Selain itu, banyak pedagang juga merasa takut mengalami nasib seperti di daerah lain, di mana setelah revitalisasi selesai dikerjakan, pedagang lama tidak mampu membayar sewa yang naik tinggi dan akhirnya digantikan oleh pedagang baru yang lebih mampu. Pengalaman ini menimbulkan rasa curiga di kalangan para pedagang bahwa program revitalisasi ini hanya cara untuk menggusur pedagang kecil secara halus. Penolakan pedagang sebenarnya merupakan bentuk protes terhadap kebijakan yang tidak transparan dan tidak melibatkan mereka secara langsung, serta menunjukkan hilangnya kepercayaan para pedagang terhadap pihak pengelola pasar.

Meskipun program revitalisasi pasar menuai kontroversi dan penolakan dari para pedagang, tidak dapat dipungkiri bahwa revitalisasi terhadap kondisi pasar tradisional Kecamatan Ciparay sudah menjadi kebutuhan mendesak. Beberapa pasar saat ini berada dalam kondisi memprihatinkan dan bahkan tidak layak untuk digunakan, baik dari segi kebersihan, keamanan, kenyamanan maupun daya saing ekonomi dengan pihak lain. Sebagian besar pasar tradisional yang dibangun puluhan tahun yang lalu tentunya sudah mengalami kerusakan parah, seperti atap bocor, lantai licin dan becek, saluran air yang tersumbat hingga menimbulkan genangan dan bau yang tidak sedap. Kondisi seperti ini tidak hanya membuat lingkungan kerja pedagang menjadi tidak nyaman dan tidak sehat, tetapi juga membuat pembeli enggan datang karena pasar tradisional terlihat jauh tertinggal dibandingkan dengan pasar modern yang lebih tertata, bersih dan nyaman.

Dari segi kebersihan dan sanitasi, banyak pasar tradisional masih kekurangan fasilitas dasar seperti toilet yang layak, tempat pembuangan sampah yang memadai, serta sirkulasi udara yang baik. Kondisi ini membuat pasar menjadi tidak nyaman dan berpotensi menimbulkan berbagai penyakit. Masalah ini semakin penting diperhatikan karena setelah pandemi COVID-19, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan kebersihan meningkat, sehingga pasar seharusnya mampu memenuhi standar kebersihan dan protokol kesehatan yang lebih ketat di ruang publik.

Melihat kondisi pasar tradisional Kecamatan Ciparay yang menjadi sumber kebutuhan kehidupan masyarakat, maka dari itu pemerintah merancang program revitalisasi pasar tradisional yang ada di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. program revitalisasi ini mengacu pada kondisi pasar yang semakin lama mengalami penurunan kualitas kenyamanan, keamanan, dan juga dari segi kebersihan. Dengan adanya program revitalisasi ini, di harapkan mampu meningkatkan kembali kualitas pasar yang pada dasarnya menjadi pusat ekonomi masyarakat yang bersih, tertib dan mampu menarik pengunjung untuk datang ke pasar tradisional. Dengan fasilitas yang lebih baik, pasar yang lebih bersih dan aman tentunya dapat memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik untuk pedagang maupun pembeli. Pada akhirnya, program revitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ekonomi masyarakat secara keberlanjutan.

Revitalisasi pasar, bila dilakukan dengan cara yang tepat dan melibatkan pedagang, bukan sekadar mempercantik bangunan pasar, tetapi menjadi langkah penting untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional. Pembenahan ini juga bisa membantu meningkatkan pendapatan pedagang karena kenyamanan dan kepercayaan pembeli akan bertambah. Lebih dari itu, revitalisasi berfungsi untuk menjaga peran pasar tradisional sebagai ruang sosial dan ekonomi yang terbuka bagi semua kalangan. Oleh karena itu, revitalisasi seharusnya dipandang bukan sebagai ancaman bagi pedagang, melainkan sebagai upaya penting untuk memastikan pasar tradisional tetap bertahan dan berkembang di tengah perubahan zaman. (Hamid, 2022)

Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam mengingat pentingnya proses negosiasi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara pemerintah dengan pedagang, terutama saat terjadi perbedaan kepentingan dalam proses perancangan program revitalisasi pasar tradisional. Akan tetapi, pada kenyataannya negosiasi seringkali tidak seimbang yang disebabkan adanya ketimpangan kekuasaan dari kedua belah pihak. Akibatnya, hasil negosiasi tidak selalu memberikan keadilan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting untuk dikaji bagaimana proses negosiasi yang terjadi dalam mengatasi konflik ini, apakah pedagang benar-benar dilibatkan secara langsung, atau hanya menjadi pihak penerima keputusan saja. Berdasarkan fenomena tersebutlah penulis merumuskan

penelitian dengan judul “Negosiasi Sosial Antara Pedagang Dengan Pengelola Terhadap Rencana Revitalisasi Pasar Tradisional Di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses negosiasi antara pedagang dengan pengelola pasar tradisional Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana solusi yang didapatkan setelah melakukan proses negosiasi antara pedagang dengan pengelola pasar tradisional Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses negosiasi antara pedagang dengan pengelola pasar tradisional Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung?
2. Untuk mengetahui bagaimana solusi yang didapatkan setelah melakukan proses negosiasi antara pedagang dengan pengelola pasar tradisional Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak di masa depan, manfaat-manfaat tersebut di antaranya:

1. Secara Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema yang berkaitan. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi dan wawasan bagi masyarakat khususnya dalam mengatasi konflik yang terjadi antara pedagang dengan pengelola pasar tradisional.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan dan informasi mengenai hubungan sosial dalam konteks ekonomi lokal masyarakat.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman sosiologis mengenai revitalisasi pasar sebagai suatu proses sosial yang tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, tetapi juga melibatkan perbedaan kepentingan, interaksi, negosiasi, dan kompromi antara pedagang dengan pengelola pasar. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya penerapan Teori Negotiated Order Anselm Strauss dalam memahami proses terbentuknya kesepakatan dan tatanan sosial dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional.

3. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola pasar di daerah lain dalam melaksanakan program revitalisasi pasar tradisional. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pembelajaran bahwa komunikasi dan musyawarah dapat membantu menciptakan kesepakatan, mengurangi potensi konflik, serta mendukung pelaksanaan revitalisasi dengan lebih baik. Dengan demikian, komunikasi dan negosiasi dapat dijadikan bagian penting dalam proses pengelolaan revitalisasi pasar, bukan hanya sebagai upaya penyelesaian ketika terjadi konflik.

E. Kerangka Berpikir

Penolakan dari pedagang terhadap rencana revitalisasi pasar tradisional Kecamatan Ciparay yang direncanakan oleh pihak pengelola pasar. Program revitalisasi pasar ini sebenarnya dibuat untuk memperbaiki kondisi fisik pasar yang sudah tidak layak, meningkatkan kenyamanan dan keamanan, serta memperkuat posisi agar pasar tradisional mampu bersaing dengan pasar modern. Namun, dalam pelaksanaannya justru mendapat penolakan dari para pedagang karena dianggap tidak menguntungkan pedagang dan kurangnya transparansi, terutama terkait rincian biaya, perkiraan kenaikan biaya sewa, dan mekanisme kompensasi selama proses revitalisasi berlangsung. Selain itu, para pedagang juga merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait program tersebut.

Penolakan dari para pedagang ini mencerminkan adanya ketimpangan kekuasaan antara pedagang sebagai pengguna/penyewa pasar dengan pengelola pasar sebagai pihak yang memiliki otoritas penuh dalam menetapkan kebijakan.

Ketimpangan ini terwujud dalam beberapa aspek: pertama, ketimpangan dalam akses informasi dimana pengelola memiliki akses penuh terhadap rencana revitalisasi, sementara pedagang hanya menerima informasi yang tidak lengkap dari pihak pengelola yang menimbulkan kesalah pahaman; kedua, ketimpangan dalam proses pengambilan keputusan di mana kebijakan dibuat tanpa melibatkan partisipasi pedagang; ketiga, ketimpangan dalam aspek ekonomi di mana para pedagang yang memiliki keuntungan tidak besar sangat kesulitan untuk memenuhi biaya sewa dan operasional yang diperkirakan akan naik.

Dengan adanya penolakan seperti ini tentunya membutuhkan adanya penyelesaian yang salah satu caranya yaitu dengan melakukan negosiasi antara kedua belah pihak untuk mencari kesepakatan terkait pelaksanaan program revitalisasi ini. Namun, proses negosiasi yang dilakukan ini tidak berjalan seimbang karena adanya perbedaan kepentingan yang cukup besar antara pedagang dan pengelola pasar.

Untuk memahami dinamika negosiasi sosial dalam penyelesaian konflik ini, peneliti menggunakan teori *Negotiated Order* yang memandang bahwa penolakan pedagang terhadap rencana revitalisasi pasar tradisional dapat dipahami sebagai bagian dari proses negosiasi sosial yang terus berlangsung dalam tatanan sosial pasar itu sendiri. Menurut teori Strauss ini, tatanan sosial bukanlah sesuatu yang tetap atau hanya ditentukan oleh aturan formal, tetapi dibentuk melalui interaksi dan negosiasi antara para aktor sosial yang terlibat, termasuk pedagang, pengelola dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan. (Nadai & Maeder, 2008)

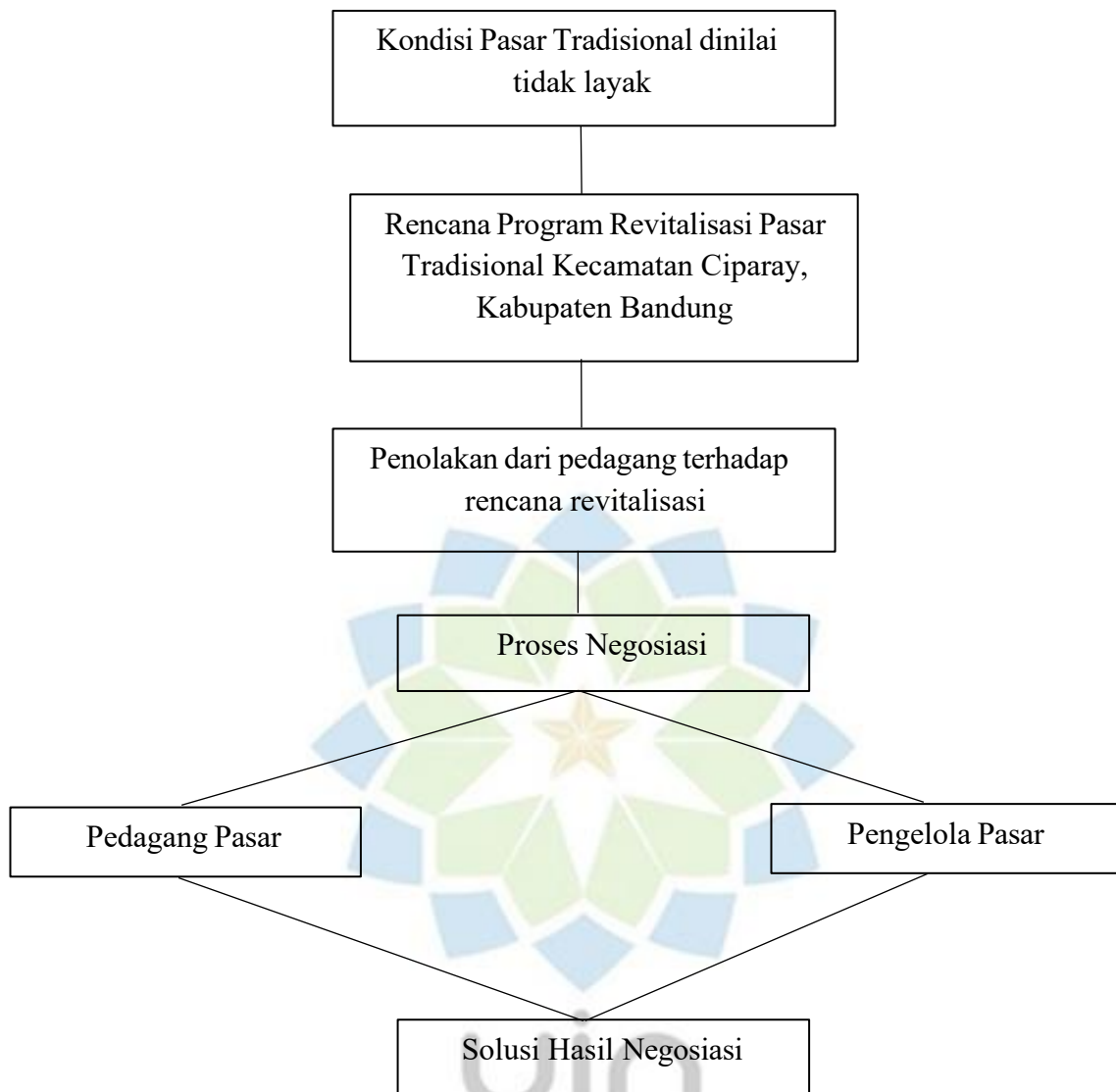
Dalam konteks penelitian ini, ada beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam proses negosiasi, pertama struktur kekuasaan yang menentukan situasi tawar-menawar antara kedua belah pihak. Kedua strategi negosiasi yang digunakan apakah bersifat saling mengalah atau mencari keuntungan bersama (win-win). Ketiga apakah ada peran pihak ketiga atau mediator dalam membantu proses negosiasi. Terakhir, hasil akhir negosiasi dan sejauh mana kedua belah pihak merasa puas dengan kesepakatan yang dicapai.

Namun perlu disadari bahwa negosiasi yang terjadi dalam situasi ketimpangan kekuasaan sering kali menghasilkan kesepakatan yang tidak adil bagi pihak yang lebih lemah. Dalam kasus konflik ini, para pedagang terkadang terpaksa menerima kesepakatan yang sebenarnya merugikan mereka. Oleh sebab itu, analisis

terhadap proses negosiasi ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir dan kesepakatan akhir saja, tetapi juga pada bagaimana pedagang berupaya melawan atau bertahan, sejauh mana mereka mampu memperjuangkan haknya, serta solusi negosiasi terhadap keberlangsungan ekonomi para pedagang dan pengelolaan pasar tradisional yang lebih baik. (Nadai & Maeder, 2008)

Melalui kerangka berpikir ini, peneliti berusaha memahami secara lebih mendalam mengenai proses negosiasi sosial antara pedagang dan pengelola terhadap rencana revitalisasi pasar tradisional di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan teori tentang negosiasi sosial dalam ekonomi dan politik di tingkat lokal, serta memberikan masukan praktis untuk memperbaiki pengelolaan pasar tradisional yang lebih baik.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Gambar 1. 1 Kerangka Berfikir